

Logo
Provinsi/Kabupaten

..... *(Di isi sesuai dengan nomenklatur anggaran daerah)*

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Provinsi/Kabupaten
2018

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

..... (Di isi dengan judul KAK)

TA. 2018

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - d. Peraturan Menteri PUPR No. 17/PRT/M/ 2015 tentang Komisi Irigasi
 - e. Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
 - f. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusitamaan Gender di Daerah
 - g. Peraturan Daerah No. (yang terkait)

2. Gambaran Umum

..... (Paragraf pertama Diisi dengan keadaan kondisi daerah setempat)

Program Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) Loan 3529-INO yang didanai oleh pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) Loan 8327-INO akan mendanai Pemerintah sebanyak Rp..... (sesuai dengan nilai NPHD) yang akan melaksanakan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Dengan satu pengertian bahwa kenyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia: (i) Kelembagaan petani, air dan irigasi lemah; (ii) Sistem irigasi kurang dan buruk pemeliharannya; (iii) Kurang tenaga dan lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) Prasarana kurang dan buruk pemeliharannya; (v) Akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa terbatas; (vi) Kepemilikan lahan tidak jelas; (vii) Kesenjangan teknologi, dan (viii) Potensi komoditas bernilai tinggi terabaikan.

Program kegiatan IPDMIP akan memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi yang airnya dipasok oleh waduk di daerah lumbung pangan yang belum ditangani oleh kegiatan lain. Berdasarkan penilaian cepat (rapid assessment) kondisi jaringan irigasi di seluruh Indonesia yang dilaksanakan baru-baru ini, kegiatan akan menargetkan provinsi dan kabupaten yang kebanyakan jaringan irigasinya rusak sedang hingga rusak berat yang tidak sepenuhnya dapat ditanggulangi dengan alokasi DAK hingga saat ini.

Sektor pertanian dan keamanan pangan Indonesia diharapkan akan meningkat dengan menjadikan pertanian sebagai sektor yang menarik untuk investasi. Banyak perbaikan signifikan pada potensi ini untuk investasi publik yang kuat pada di pertanian

dan mendorong pertumbuhan pada sektor pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian diatas, **Provinsi/Kabupaten** yang ikut berkontribusi dalam program IPDMIP ini merasa perlu untuk melakukan suatu perencanaan program pusat maupun daerah peserta program untuk melakukan penyusunan perencanaan kegiatan maupun **Tahun Anggaran 2018** agar lebih terkoordinir.

B. Penerima Manfaat

1. Pemerintah Daerah, yaitu meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pertanian beririgasi.
2. **..... Dst.**

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam rangka mencapai output dimaksud adalah dengan Metode **..... (sesuai kebutuhan).**

2. Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan kegiatan melalui:

1) Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi:

- a. **Pendirian / Revitalisasi** Komisi Irigasi
 - i. Tujuan: Membentuk lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah **Provinsi / Kabupaten** dan wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada Provinsi / Kabupaten yang aktif dan beroperasi sesuai dengan fungsinya.
 - ii. Metode: Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah metode swakelola dalam bentuk pertemuan yang melibatkan Wakil Pemerintah **Provinsi / Kabupaten** yang membidangi irigasi (Bappeda, Dinas PU dan Dinas Pertanian), wakil Perkumpulan petani air, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya.
 - iii. Tahapan: Kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan rapat internal dengan peserta dari Bappeda **Provinsi/Kabupaten** dan kemudian dilanjutkan dengan rapat eksternal yang mengundang Dinas/lembaga terkait dengan Irigasi, hasil akhir sampai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Komisi Irigasi.
 - iv. Peserta: Peserta terdiri dari unsur Pemerintah **Provinsi/Kabupaten** yaitu Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian, Unsur Perkumpulan Petani Pemakai Air, Unsur Pengguna Jaringan Irigasi, dan Lembaga Pendidikan.
 - v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
 - vi. Waktu Pelaksanaan :

b. Pelatihan KOMIR

- i. Tujuan: Mewujudkan personil anggota KOMIR yang mampu dalam menjalankan organisasi Komisi Irigasi.
- ii. Metode : Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah ceramah/diskusi/ tanyajawab/FGD
- iii. Tahapan : Kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan rapat internal Bappeda Provinsi/Kabupaten, dilanjutkan dengan rapat eksternal yang mengundang Dinas membidangi irigasi (Dinas PU dan Dinas Pertanian), wakil Perkumpulan petani air, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya.
- iv. Peserta : Peserta terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten yaitu Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian, Unsur Perkumpulan Petani Pemakai Air selaku anggota KOMIR, Unsur Pengguna Jaringan Irigasi.
- v. Jumlah peserta (P minimal 30%) :
 - OPD (Bappeda/PU/Pertanian Orang (L/P)
 - KOMIR.....Orang (L/P),
 - P3A/GP3A.....Orang (L/P)
- vi. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- vii. Waktu pelaksanaan :

c. KOMIR Meetings (3 kali per tahun) @30 orang

- i. Tujuan: Terwujudnya koordinasi di internal Komisi Irigasi.
- ii. Metode : Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah melalui Rapat/Pertemuan yang melibatkan seluruh Anggota Komisi Irigasi.
- iii. Tahapan : Kegiatan ini dilakukan rutin kali dalam satu tahun.
- iv. Peserta : Peserta terdiri dari seluruh anggota Komisi Irigasi.
- v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).

2) Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama

a. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Publik Peraturan Irigasi (PPSI)

- i. Tujuan: meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan PPSI serta memperkuat pengetahuan umum dan pemahaman bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sensitif gender, tentang peraturan perundangan yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- ii. Metode : Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah paparan/workshop/ pertemuan/ FGD.
- iii. Lokasi Kegiatan :
- iv. Jumlah peserta (P minimal 30%) :
 - OPD (Bappeda/PU/Pertanian Orang (L/P)
 - KOMIR.....Orang (L/P),
 - P3A/GP3A.....Orang (L/P)
- v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).

b. Workshop PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi)

- i. Tujuan: Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan irigasi yang diwujudkan melalui program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif untuk mencapai ketahanan pangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi.
- ii. Metode : Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah melalui *ceramah/diskusi/dialog diantara para peserta rapat/ pertemuan yang didukung dengan diskusi kelompok untuk hasil yang lebih mendalam. .*
- iii. Lokasi :
- iv. Jumlah peserta (P minimal 30%) :
 - OPD (Bappeda/PU/Pertanian Orang (L/P)
 - KOMIR.....Orang (L/P),
 - P3A/GP3A.....Orang (L/P)
- v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).

c. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan – Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

- i. Tujuan: Menyusun Perda LP2B guna mendukung ketahanan pangan di daerah .
- ii. Metode : review kebijakan pendukung, literatur dan analisis data LP2B, dan menyusun naskah akademis.
- iii. Tahapan : Kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan rapat persiapan, pemetaan kondisi eksisting lahan sawah beririgasi, kajian akademis, penyusunan draft Ranperda, pembahasan draft Ranperda, uji publik, pengajuan ke Biro Hukum, pembahasan di DPRD dan Finalisasi Perda.
- iv. Tim Penyusun : Unsur Pemerintah (OPD sebagai inisiatif, dan OPD terkait), akademisi, LSM, Pemerhati, tokoh masyarakat , tokoh adat dan tokoh agama, tokoh perempuan.
- v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- vi. Waktu pelaksanaan :

d. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan

- i. Tujuan: Menyusun Perda lainnya guna mendukung ketahanan pangan di daerah .
- ii. Metode : review kebijakan pendukung, literatur dan analisis data lainnya, dan menyusun naskah akademis.
- iii. Tahapan : Kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan rapat persiapan, pemetaan kondisi eksisting, kajian akademis, penyusunan draft Ranperda, pembahasan draft Ranperda, uji publik, pengajuan ke Biro Hukum, pembahasan di DPRD dan Finalisasi Perda.
- iv. Tim Penyusun : Unsur Pemerintah (OPD sebagai inisiatif, dan OPD terkait), akademisi, LSM, Pemerhati, tokoh masyarakat , tokoh adat dan tokoh agama, tokoh perempuan.
- v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- vi. Waktu pelaksanaan :

e. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang LP2B

- i. Tujuan: Mendiseminasikan Perda LP2B dalam rangka mempermudah Pemerintah Daerah untuk implementasi kebijakan LP2B dalam mendukung ketahanan pangan di daerah .
- ii. Metode : workshop, sosialisasi, penyadaran publik.
- iii. Tahapan : Kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan rapat internal Bappeda Provinsi/Kabupaten dengan melibatkan OPD terkait dan Biro Hukum Setda Provinsi dalam rangka penentuan kelompok target (eksekutif/legislatif dan tokoh masyarakat , tokoh adat dan tokoh agama, tokoh perempuan), serta menyusun materi sosialisasi.
- iv. Peserta : Peserta terdiri dari unsur Unsur Pemerintah (OPD sebagai inisiatif, dan OPD terkait), akademisi, LSM, Pemerhati, tokoh masyarakat , tokoh adat dan tokoh agama, tokoh perempuan.
- v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- vi. Waktu pelaksanaan :

3) Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator

a. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM di 14 Propinsi

- i. Tujuan: Meningkatkan kemampuan TPM dan KTPM dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan
- ii. Metode : Pembelajaran untuk orang dewasa (*andragogi*) baik diselenggarakan dikelas maupun diluar kelas.
- iii. Tahapan : Rapat persiapan, Penyiapan Pedoman Pelatihan dan Modul, Pelaksanaan Pelatihan, Evaluasi dan Pelaporan.
- iv. Biaya: Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.,- (..... rupiah).
- v. Waktu pelaksanaan : 3 - 4 Hari.

4) Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan efisiensi pelaksanaan proyek (Pengadaan TPM/KTPM)

a. Koordinator (KTPM)

- i. Tujuan: Membantu B/BWS, PPIU dan KPIU dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan serta mengkoordinir TPM pada wilayah kerja.
- ii. Metode : Metode Pengadaan KTPM dikelola oleh Bappeda Provinsi, kecuali pada Provinsi yang tidak mengikuti Program oleh B/BWS dengan mekanisme swakelola atau kontraktual.
- iii. Tahapan : Penyusunan materi pengadaan, penyebaran informasi, pelaksanaan seleksi, dan penetapan serta pelatihan.
- iv. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- v. Waktu pelaksanaan :

b. Fasilitator/TPM

- i. Tujuan: Membantu B/BWS, PPIU dan KPIU dalam melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pada wilayah kerja yang ditetapkan.
- ii. Metode : Metode Pengadaan TPM dikelola oleh Bappeda Provinsi, kecuali pada Provinsi yang tidak mengikuti Program oleh B/BWS dengan mekanisme swakelola atau kontraktual.
- iii. Tahapan : Penyusunan materi pengadaan, penyebaran informasi, pelaksanaan seleksi, dan penetapan serta pelatihan.
- iv. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- v. Waktu pelaksanaan :

c. Biaya Operasional Koordinator

- i. Tujuan: Mendukung pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan KTPM.
- ii. Metode : Lumsump.
- iii. Biaya : Biaya operasional diperuntukan kunjungan lapangan dan biaya pelaporan yang dibutuhkan. sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- iv. Waktu pelaksanaan :

d. Biaya Operasional Fasilitator/ TPM

- i. Tujuan: Mendukung pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan TPM.
- ii. Metode : Lumsump.
- iii. Biaya : Biaya operasional diperuntukan kunjungan lapangan dan biaya pelaporan yang dibutuhkan. sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- iv. Waktu pelaksanaan :

5) Koordinasi Tingkat Provinsi

a. Koordinasi Penyusunan OWP/AWP

- i. Tujuan: Untuk melakukan konsolidasi rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- ii. Metode : Pertemuan / Rapat.
- iii. Tahapan : Rapat persiapan, Penyusunan materi, Pelaksanaan, dan Pelaporan.
- iv. Peserta : PPMU/PPIU dan KPMU/KPIU.
- v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- vi. Waktu pelaksanaan :

b. Monev Kwartal di Bappeda

- i. Tujuan : Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan program.
- ii. Metode : Survei/FGD/wawancara.
- iii. Tahapan : Rapat persiapan, penyusunan instrument, penyusunan jadwal pelaksanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
- iv. Peserta : PPMU/PPIU dan KPMU/KPIU.
- v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
- vi. Waktu pelaksanaan :

6) Project Implementing Unit – Bappeda

- a. Unit Pelaksana Program Tkt. Propinsi - Bappeda
 - i. Tujuan: Melaksanakan kegiatan yang telah disusun pada Program Kerja Tahunan (AWP).
 - ii. Metode : dilaksanakan sesuai kegiatan pada AWP.
 - iii. Tahapan : Rapat persiapan, Penyusunan materi, Pelaksanaan, dan Pelaporan.
 - iv. Peserta : PPMU dan PPIU Bappeda.
 - v. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
 - vi. Waktu pelaksanaan :

7) Penyusunan Pengkajian aspek teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat DI

- a. Pelaksanaan dan penyusunan PSETK
 - i. Tujuan: Tersusunnya dokumen profil sosial ekonomi, teknik dan kelembagaan sesuai dengan daerah irigasi dalam mendukung kegiatan pengembangan dan pengelolaan system irigasi.
 - ii. Metode : Swakelola atau Kontraktual (sesuai kebutuhan)
 - iii. Tahapan : Persiapan kegiatan, Pelatihan, Pelaksanaan, Penyusunan laporan, dan tahap akhir.
 - iv. Lokasi :
 - Nama DI..... Luas DI..... ha
 - Nama DI..... Luas DI..... ha, dst
 - v. Peserta : Peserta terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten yaitu Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian, Unsur Perkumpulan Petani Pemakai Air, Unsur Pengguna Jaringan Irigasi, TPM dan Kelompok pendamping lapangan (KPL).
 - vi. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
 - vii. Waktu pelaksanaan :

8) Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat Kabupaten (RP2I)

- a. Pembentukan tim penyusun RP2I
 - i. Tujuan : Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi.
 - ii. Metode : Pertemuan / Rapat - Rapat.
 - iii. Tahapan : Rapat Persiapan, Identifikasi anggota tim, Penetapan Surat Keputusan tim.
 - iv. Lokasi : Bappeda Kabupaten
 - v. Peserta : Organisasi Perangkat Daerah dari unsur Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian dan unsur terkait lainnya.
 - vi. Biaya: Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.,- (.....rupiah).
 - vii. Waktu pelaksanaan :

a.	Pembentukan tim penyusun RP2I												
b.	Sosialisasi draft RP2I												

E. Biaya Yang Diperlukan

Total biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.,-
 (..... rupiah).

BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN,

.....
NIP: